

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Johar Semarang, dapat disimpulkan bahwa:

1. kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara rutin dan memiliki mekanisme yang relatif terstruktur, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal secara substantif. Implementasi telah didukung oleh adanya perencanaan kegiatan, penyampaian informasi, pelaksanaan pemeriksaan dan pengesahan alat ukur, serta monitoring dan evaluasi. Namun, keberhasilan administratif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tercapainya pemahaman, penerimaan, kepercayaan, dan kepatuhan pedagang secara merata. Temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara mekanisme yang telah dibangun oleh UPTD Metrologi Legal dengan pengalaman sebagian pedagang sebagai kelompok sasaran. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tera dan tera ulang di Pasar Johar dapat dikatakan telah berjalan pada tingkat prosedural, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek substantif agar tujuan tertib ukur dapat dicapai secara lebih konsisten.
2. Faktor pendorong dalam pelaksanaan kebijakan tera dan tera ulang di Pasar Johar meliputi adanya pola kegiatan yang rutin, petugas yang memiliki kompetensi, serta adanya pembagian tugas dan koordinasi antarpihak yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat meliputi komunikasi yang belum sepenuhnya jelas, konsisten, dan edukatif, keterbatasan jumlah petugas, waktu, dan data pendukung, keterbatasan ruang dialog, monitoring pascapelaksanaan yang belum optimal, serta faktor eksternal berupa perbedaan tingkat pemahaman pedagang, ketidakjelasan informasi, dan persepsi negatif terhadap kegiatan tera. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan, karena

keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi intensitas komunikasi dan monitoring, sedangkan komunikasi yang kurang mendalam dapat memengaruhi pemahaman dan persepsi pedagang. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, serta kondisi kelompok sasaran secara bersama-sama.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis mendalam terhadap proses implementasi kebijakan tera dan tera ulang di Pasar Johar Semarang, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan bagi UPTD Metrologi Legal Kota Semarang, pengelola Pasar Johar, serta pedagang sebagai kelompok sasaran kebijakan.

1. UPTD Metrologi Legal perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dan sosialisasi kepada pedagang. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya terbatas pada penyebaran brosur atau unggahan media sosial, tetapi harus dilakukan melalui komunikasi langsung yang bersifat edukatif. UPTD dapat mengadakan sesi penyuluhan singkat di dalam pasar sebelum pelaksanaan, menyediakan materi penjelasan visual tentang proses tera, serta memperjelas perbedaan antara biaya tera yang gratis dan biaya perbaikan yang ditanggung pedagang. Peningkatan kualitas komunikasi akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan pedagang dalam mengikuti tera ulang.
2. Peningkatan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sangat diperlukan. UPTD perlu mempertimbangkan penambahan jumlah petugas penera untuk mengurangi beban kerja yang padat, terutama di pasar besar seperti Pasar Johar. Selain itu, peremajaan alat tera standar dan perawatan gedung UPTD menjadi prioritas agar kualitas layanan tetap terjaga. Pemerintah Kota Semarang

dapat mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung peningkatan ini sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan metrologi legal.

3. Peningkatan kualitas disposisi pelaksana kebijakan harus dilakukan melalui pelatihan sikap pelayanan publik dan komunikasi teknis. Petugas perlu dibekali kemampuan menjelaskan alasan teknis mengapa timbangan dinyatakan tidak sah, serta sikap profesional dalam memperlakukan timbangan pedagang. Penguatan etika pelayanan akan membantu meningkatkan kepercayaan pedagang dan memperbaiki persepsi publik terhadap kegiatan tera.
4. Perlu dikembangkan mekanisme monitoring pasca pelaksanaan sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan. UPTD dapat melakukan kunjungan acak ke pasar setelah kegiatan tera, menyediakan saluran pengaduan online, atau membuat database digital yang mencatat kondisi timbangan dari waktu ke waktu. Monitoring ini penting untuk mengetahui apakah terjadi perubahan akurasi setelah penggunaan harian, apakah pedagang menghadapi kendala, serta apakah layanan tera berjalan sesuai harapan. Monitoring juga memungkinkan UPTD melakukan eksplorasi masalah secara cepat dan memberikan solusi yang tepat.
5. Pengelola Pasar Johar perlu lebih aktif dalam koordinasi dan pendampingan kepada pedagang, terutama saat menerima informasi resmi dari UPTD. Kepala Pasar dan PPJP dapat membantu meneruskan informasi melalui grup WhatsApp pedagang, pengeras suara pasar, atau papan pengumuman khusus agar seluruh pedagang menerima informasi secara merata.
6. Pedagang sebagai pengguna timbangan perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pentingnya tera dan tera ulang bagi keadilan transaksi. Pedagang juga sebaiknya lebih aktif menanyakan prosedur, meminta penjelasan

teknis bila timbangan mereka dinyatakan tidak sah, serta menggunakan saluran pengaduan yang disediakan untuk melaporkan masalah yang muncul setelah tera.

Dengan memperkuat komunikasi, meningkatkan sumber daya, memperbaiki disposisi pelaksana, dan menambahkan monitoring sebagai bagian dari siklus implementasi kebijakan, diharapkan kegiatan tera dan tera ulang di Pasar Johar Semarang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih nyata dalam memastikan keadilan transaksi serta perlindungan konsumen di pasar tradisional terbesar di Kota Semarang.